Society

Society, 10 (2), 296-308, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874
https://society.fisip.ubb.ac.id

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Perjanjian Damai dengan Taliban Tahun 2020

Awani Yamora Masta
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Pascasarjana,
Universitas Indonesia, 16424, Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
* Korespondensi: awani.yamora@ui.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:
Masta, A. Y. (2022). United States Foreign Policy: Peace Agreement with the Taliban in 2020. Society, 10(2), 289-300.

DOI: *10.33019/society.v10i2.422*

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN ACCESS

Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 30 September, 2022;
Diterima: 30 Oktober, 2022;
Dipublikasi: 23 November, 2022;

ABSTRAK

Peristiwa 9/11 tahun 2001 membuat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Global War on Terror (GWOT). Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah perang melawan kelompok Al-Qaeda di bawah rezim Taliban di Afghanistan. AS telah melancarkan beberapa serangan terhadap Taliban, menewaskan banyak tentara AS dan masyarakat sipil di wilayah tersebut. Setelah puluhan tahun memerangi Taliban dengan kekuatan militer, AS akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Taliban pada 29 Februari 2020. Meskipun militer AS masih berada di garis depan peperangan, ia memilih untuk menggunakan pendekatan yang lunak terhadap lawan perangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat untuk mengadakan perjanjian damai dengan Taliban pada tahun 2020. Teori yang digunakan adalah teori pengambilan keputusan. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data dari tulisan ilmiah dan berita kredibel yang membahas topik terkait atau serupa. Temuan dalam penelitian ini menyiratkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi perjanjian damai dengan Taliban yang ditandatangani oleh AS pada tahun 2020. Faktor tersebut adalah politik dalam negeri, kapasitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Kata Kunci: *Amerika Serikat; Perjanjian Damai; Taliban; Teori Pengambilan Keputusan*

1. Pendahuluan

Pembahasan tentang konflik kekuatan besar merupakan hal yang lumrah dalam kajian hubungan internasional, dimana aktor-aktor tertentu dapat menentukan dinamika keamanan

internasional. Salah satu yang terbaru adalah serangan Al-Qaeda di Pentagon. Fenomena ini mungkin salah satu contoh paling populer dalam hubungan internasional modern yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam pendekatan koersif.

AS mengalami tragedi terorisme terburuk pada tahun 2001, yang sekarang disebut sebagai peristiwa 9/11. Saat itu, Al-Qaeda menghancurkan gedung kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Menanggapi serangan ini, AS kemudian mengeluarkan kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) yang kemudian menjadi legalitas AS dalam menginisiasi segala bentuk upaya untuk melawan kelompok teroris (Stohl, 2008). Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan ini adalah perang melawan kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Kebijakan ini dibuat untuk mengimbau agar kelompok Al-Qaeda menyerah kepada AS. Al-Qaeda yang saat itu berlindung di Afghanistan di bawah rezim Taliban, menolak seruan AS tersebut. Penolakan ini kemudian memicu invasi AS ke Afghanistan untuk melawan Taliban.

Dengan demikian, AS telah melakukan lusinan serangan militer terhadap Taliban selama 18 tahun terakhir. Perjalanan panjang memerangi kelompok Taliban menjadi perhatian banyak kalangan. Tak sedikit pula yang beranggapan bahwa seharusnya konflik ini sudah berakhir sejak lama. Beberapa warga AS dan pihak internasional mengatakan perang Afghanistan tidak layak dilanjutkan (Hubbard, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, inisiatif pertama yang menandakan dimulainya proses pembicaraan mengenai kesepakatan damai telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018, melalui Pertemuan AS - Taliban pada masa kepresidenan Donald Trump. Sehingga pada akhirnya, hubungan konflik AS – Taliban kemudian berubah menjadi perjanjian damai yang ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar (International Crisis Group, 2020).

Perjanjian damai yang dibuat oleh AS cukup aneh. Pasalnya, kekuatan militer dan posisi AS yang masih kuat dalam sistem internasional memungkinkan AS untuk tetap menggunakan pendekatan militer dalam melakukan intervensi di Afghanistan. Selain itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara besar cenderung tidak menggunakan perjanjian damai untuk menyelesaikan konflik dengan lawan perangnya, apalagi perang dengan kelompok teroris. Hal ini terlihat dari beberapa peristiwa perang atau konflik yang terjadi selama ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa konflik antar aktor yang bertikai biasanya tidak berakhir dengan kesepakatan damai. Misalnya, Jerman berperang melawan sekutu dalam Perang Dunia I dari tahun 1914 hingga 1918. Jerman akhirnya kalah, dan sekutu memenangkan perang tersebut (Roberts, 2004). Berikutnya adalah Perang China-Jepang Kedua, dimana Jepang berkonflik dengan China dari tahun 1937-1945 (Mitter & Moore, 2011). Perang ini juga berakhir dengan kekalahan Jepang dan kemenangan China. Perang Dunia II tahun 1939-1945 (Weisiger, 2013) juga membuahkan hasil serupa dimana kemenangan menjadi milik Blok Barat, sedangkan Blok Timur dinyatakan kalah. Contoh yang cukup berbeda dapat dilihat pada Perang Korea, dimana Korea Utara berperang dengan Korea Selatan selama tiga tahun, dari tahun 1950-1953 (Kim, 2013). Namun, akhir dari perang ini juga bukanlah perjanjian damai, melainkan gencatan senjata. Sehingga dapat dilihat bahwa perang bersenjata cenderung berakhir dengan kekalahan dan kemenangan atau gencatan senjata, bukan kesepakatan damai.

Aksi AS yang pada akhirnya menghentikan operasi militer yang telah dilakukan bertahun-tahun dan menelan biaya ribuan pasukan AS ini menarik untuk dikaji. Anomali negara besar yang cenderung tidak menggunakan perjanjian damai dengan musuh-musuhnya dan kekhasan AS yang memiliki kekuatan militer sangat besar namun memilih menggunakan pendekatan "lunak" untuk menghadapi lawan-lawannya menimbulkan tanda tanya yang cukup besar. tentang alasan di balik keputusan negara adidaya untuk memilih perjanjian damai.

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

Untuk mengkaji lebih jauh, penulis membatasi periode penelitian dari tahun 2018 (ketika inisiatif pertama untuk memulai perjanjian perdamaian terjadi) hingga tahun 2020 (ketika perjanjian perdamaian ditandatangani) dengan narasi pertanyaan penelitian sebagai berikut "Mengapa Amerika Serikat menyepakati perjanjian damai dengan Taliban di tahun 2020?".

2. Studi Pustaka

Dari hasil observasi yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya, pembahasan yang memanas mengenai konflik AS-Taliban secara garis besar didominasi oleh 3 poin, yaitu: (1) Efektivitas upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan; (2) Transformasi pandangan Taliban saat ini yang tidak lagi dipandang sebagai teroris, namun berpotensi untuk diajak rekonsiliasi; dan (3) Pembenaran intervensi AS di Afghanistan. Intervensi AS di Afghanistan telah menimbulkan banyak perdebatan, terutama dalam hal justifikasi yang dimiliki AS dan efektivitas intervensi dalam mengatasi masalah domestik di Afghanistan. Taliban memiliki potensi kuat untuk diajak rekonsiliasi, sehingga intervensi AS gagal memberikan dampak yang lebih baik.

Pada kategori pertama, rezim (Shahrani, 2015); *tribal politics* (Baczko, 2016); dan *just war theory* (Connah, 2020) memainkan peran penting dalam masalah ini. Penerapan, dampak, dan efektivitas penggunaan kekuatan militer suatu rezim dalam mempertahankan otoritasnya juga menjadi topik diskusi yang cukup hangat terkait isu ini. Dalam menyelesaikan konflik dan menggunakan upaya militer, aspek nonmiliter seperti politik juga diperlukan.

Pada kategori kedua, pendekatan diplomasi (Behuria *et al.*, 2019) dan analisis wacana (Renner & Spencer, 2013) merupakan instrumen penting dalam penyelesaian konflik, yang dalam hal ini merujuk pada konflik AS-Taliban. Terjadi perubahan karena Taliban yang semula dipandang sebagai teroris dan dianggap musuh, kemudian berubah menjadi kemitraan yang berpotensi untuk diajak berdamai.

Dalam kategori ketiga, diskusi mengenai pembenaran intervensi AS di Afghanistan memainkan peran penting. Dari sudut pandang hukum internasional (Ulfstein, 2003), ada pandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh AS dibenarkan sebagai langkah upaya pertahanan diri (*self-defense*). Namun, di sisi lain, ada pula pandangan bahwa intervensi yang dilakukan AS juga turut menyebabkan kegagalan pemerintah di Afghanistan sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal penerapan kebijakan *War on Terror*.

Temuan sementara dari kajian pustaka yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas latar belakang upaya penyelesaian konflik yang dilakukan AS hingga akhirnya membuat perjanjian damai dengan Taliban pada tahun 2020. Kajian ini Mengenai kepentingan perjanjian perdamaian AS – Taliban penting untuk diteliti lebih lanjut untuk lebih memahami apa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS sehingga memilih langkah-langkah nonmiliter untuk menyelesaikan konflik dengan Taliban. Untuk itu, dengan menggunakan kerangka teoritis pembuatan kebijakan luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong AS menandatangani perjanjian damai dengan Taliban.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang diperoleh, baik berupa tulisan ilmiah maupun sumber lain, maupun tindakan yang diambil dari tulisan atau data tersebut (Neuman, 2009). Metode kualitatif ini menggunakan pendekatan deduktif hubungan antara teori dan penelitian untuk mengimplementasikan teori yang akan digunakan yaitu teori pengambilan keputusan Coplin.

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

OPEN ACCESS

Pendekatan deduktif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul dalam suatu penelitian yang kemudian hasil penelitian tersebut akan diolah dan kesimpulannya dianalisis dalam bentuk gambaran umum. Cara ini ditempuh untuk mendapatkan penjelasan yang obyektif tentang latar belakang yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS dalam penandatanganan perjanjian damai dengan Taliban.

Teknik pengumpulan data menggunakan mekanisme studi kepustakaan dengan teknik triangulasi untuk menganalisis data. Jenis dan sumber data primer untuk penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah AS dan pernyataan elit politik atau pejabat pemerintah internasional. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh dari laporan dan literatur sebelumnya yang membahas isu-isu terkait konflik antara AS dan Taliban.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori pengambilan keputusan (*decision-making theory*) yang dikemukakan oleh William D. Coplin menjelaskan bahwa tindakan negara yang diwujudkan dalam kebijakan luar negeri dihasilkan dari tiga determinan yang mempengaruhi pembuat kebijakan: kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional (Coplin & Marbun, 2003).

4.1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Perjanjian perdamaian AS - Taliban sedang berlangsung selama kepresidenan Donald Trump. Menilik kondisi politik dalam negeri AS pada masa kepemimpinan kedua presiden ini, banyak terjadi gejolak memperdebatkan esensi perang AS-Taliban. Dalam hal pengaruh domestik, banyak orang Amerika menganggap perang dengan Taliban di Afghanistan tidak lagi layak diperjuangkan. Dilansir dari salah satu laman berita AS, U.S. News & World Report, media ini mengatakan bahwa setelah hampir 20 tahun berada di negara tersebut, sebagian besar warga AS mengatakan bahwa perang di Afghanistan tidak layak dilanjutkan dan menyayangkan keputusan AS yang masih ingin melanjutkan. konfliknya dengan Taliban (Hubbard, 2021). Pernyataan ini juga didapat dari survey yang dilakukan oleh AP-NORC Institute (Associated Press – The Nonpartisan and Objective Research at the University of Chicago).

Sejalan dengan argumen tersebut, Shadi Hamid, seorang senior politik AS dalam kebijakan luar negeri, khususnya di Timur Tengah, juga memiliki pandangan serupa. Hamid berpendapat bahwa Taliban lebih mengenal dan mengenal Afghanistan daripada AS. Pandangan ideal yang dicita-citakan AS di Afghanistan bukanlah sesuatu yang dibutuhkan rakyat Afghanistan. Taliban lebih tahu apa yang dibutuhkan dan rezim seperti apa yang harus didirikan di Afghanistan. Bahkan Hamid juga menyebut kegagalan pemerintah Afganistan dukungan AS bukan hanya karena Taliban. Sebaliknya, kegagalan ini juga dipengaruhi oleh kebutaan dan bias AS terhadap Afghanistan (Hamid, 2022).

Setiap calon presiden atau presiden terpilih AS lainnya selalu berjanji untuk mengakhiri perang dengan Taliban dan membawa kembali pasukan AS yang telah berperang di Afghanistan (Council on Foreign Relations, 2019). Mereka menyampaikan janji-janji tersebut selama masa kampanye dan masa jabatan presiden mereka. Namun, inisiasi dan proses pembentukan perjanjian damai antara AS dan Taliban baru terjadi pada masa kepemimpinan Donald Trump. Inisiasi awal perjanjian perdamaian dimulai pada masa kepemimpinan Donald Trump pada 28 Juli 2018, yang kemudian ditandatangani pada 29 Februari 2020.

Riset ini juga menilai bahwa kesepakatan damai ini juga dipicu oleh perubahan strategi geopolitik AS yang mulai fokus ke Asia. Hal ini kemudian menimbulkan konflik atau "urusan"

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

lain di kawasan Timur Tengah yang tidak lagi menarik bagi AS. Salah satu contoh nyata yang mendukung argumen tersebut adalah kebijakan *Pivot to Asia* yang dibentuk pada masa kepemimpinan Barack Obama. *Pivot to Asia* juga sering disebut sebagai *rebalance strategy* dimana fokus kebijakan luar negeri AS mulai bergeser dari sebelumnya di bawah kepemimpinan Bush yang cenderung berpusat pada kawasan Timur Tengah, kemudian mulai berubah lebih fokus pada kawasan Asia yang dianggap sebagai kawasan dengan aktivitas politik dan ekonomi yang akan berkembang pesat (Campbell & Andrews, 2013).

Seperti disebutkan sebelumnya, semua calon presiden AS dan presiden terpilih selalu mengkampanyekan janji mereka untuk mengakhiri konflik dengan Taliban di Afghanistan. Namun penelitian ini berargumen bahwa keseriusan penerapan hal tersebut lebih terlihat saat Donald Trump menjabat. Berkaca pada upaya yang dilakukan, presiden lainnya (Obama) memang mulai menggalakkan kebijakan *Pivot to Asia*. Namun, upaya untuk meredam intensitas konflik dengan Taliban di Afganistan tidak terlalu terlihat pada era ini, mengingat anggaran biaya konflik semakin meningkat setiap tahunnya pada masa pemerintahannya.

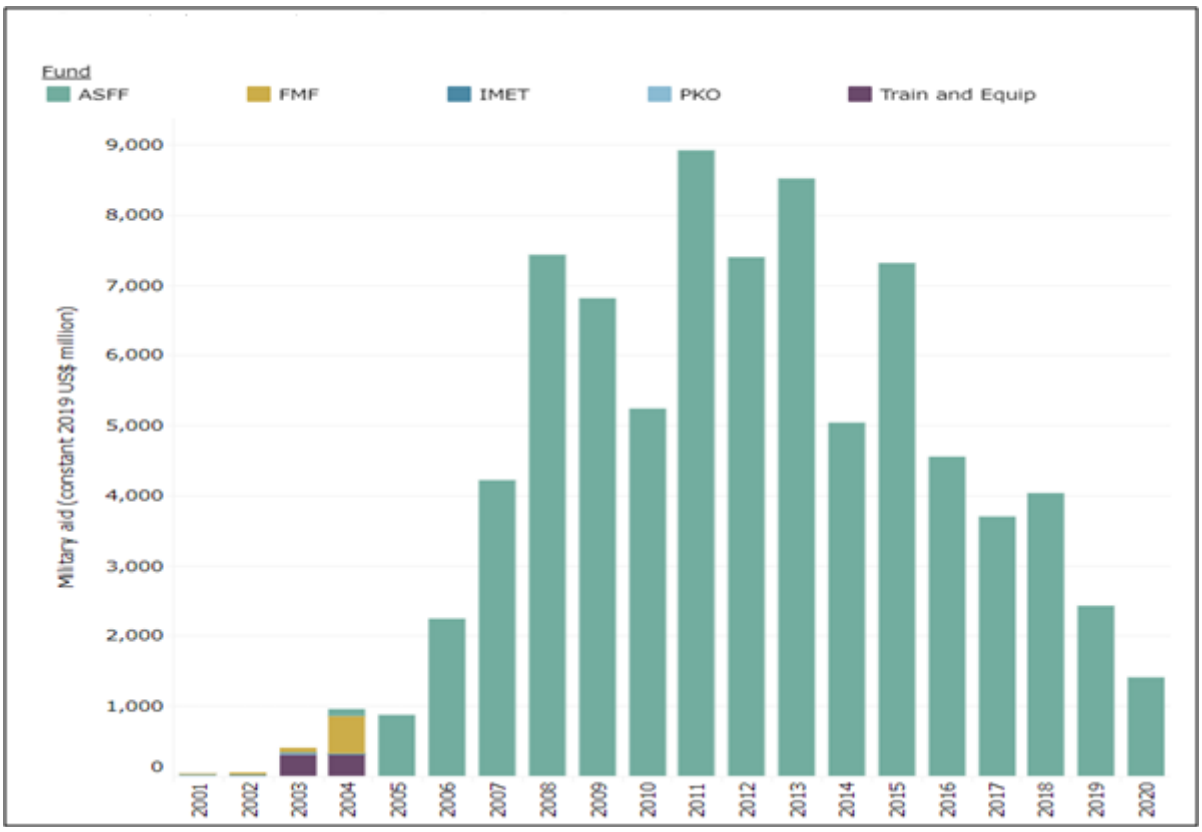

Gambar 1. Bantuan Militer AS untuk Afghanistan tahun 2001-2020
Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (2021)

Berbeda dengan Obama, Trump tampak lebih serius menangani proses perdamaian dengan Taliban. Hal ini dibuktikan dengan digagasnya pertemuan pertama dengan pihak Taliban yang kami jadwalkan pada tanggal 28 Juli 2018 yang terus berlangsung intensif pada masa kepemimpinan Donald Trump sehingga perjanjian damai dengan pihak Taliban ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2020. Sedangkan pada awal tahun Masa kepresidenannya, Joe Biden hanya diminta untuk melanjutkan isi perjanjian damai yang telah disepakati dengan Taliban sebelumnya, yakni mengembalikan pasukan AS.

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

Langkah terakhir implementasi perjanjian damai di tangan Biden menuai sejumlah pro dan kontra. Beberapa juga berpendapat bahwa proses perjanjian damai yang diteruskan dari Trump ke Biden menempatkan Biden pada posisi yang sulit (Gross, 2021). Namun, di awal pengangkatannya sebagai Presiden AS, seorang kepala negara perlu memberikan kesan yang baik dan menjaga kepercayaan warganya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memenuhi janji-janji yang telah dicanangkan selama masa kampanye dan mewujudkan agenda yang menjadi tujuan masyarakat secara umum yaitu mengakhiri konflik dengan Taliban di Afghanistan dan mengembalikan pasukan AS. Maka wajar jika proses kesepakatan damai akhirnya dilanjutkan pada era kepemimpinan Joe Biden.

4.2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Jika dilihat lebih jauh, penelitian ini juga menemukan bahwa perang yang dilakukan AS dengan Taliban di Afganistan telah mengakibatkan banyak kerugian. Selama 18 tahun menginvasi Afghanistan, biaya yang dikeluarkan AS untuk menjalankan misinya telah mencapai lebih dari 2 triliun USD (Duffin, 2019).

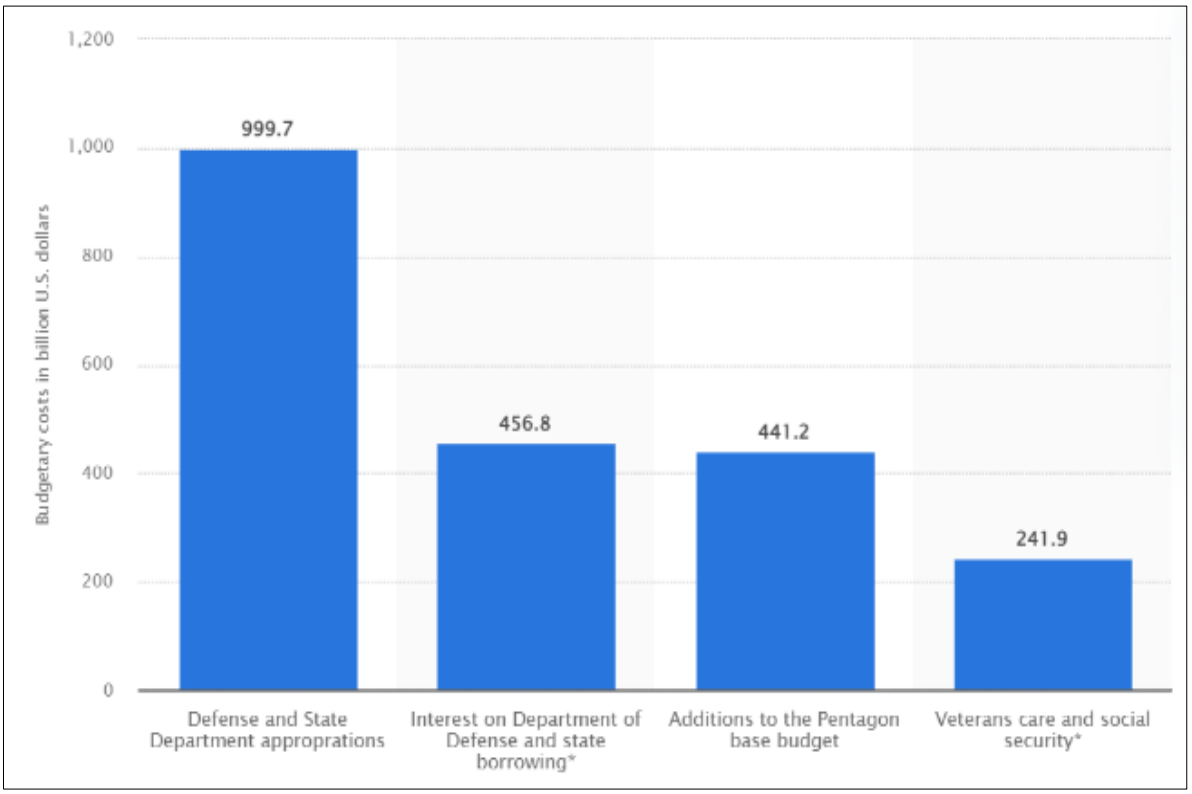

Gambar 2. Total Pengeluaran AS dalam perang melawan Taliban tahun 2019-2022
Sumber: Duffin (2019)

Tak hanya itu, selain anggarannya yang fantastis, perang AS – Taliban di Afghanistan juga telah menewaskan banyak pasukan militer AS dan warga sipil di negara tersebut. Invasi yang dilakukan AS di Afghanistan tercatat telah menewaskan lebih dari 2.000 tentara AS (Gollob & O'hanlon, 2020) dan puluhan ribu korban dari kategori lainnya.

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

Tabel 1. Estimasi angka kematian pasukan AS dan koalisinya dalam perang melawan Taliban

U.S. and coalition troop fatalities since October 2001[*]

Year	U.S. troop fatalities	Coalition troop fatalities	Contractors
2001	12	N/A	N/A
2002	49	21	N/A
2003	48	10	N/A
2004	52	8	N/A
2005	99	32	40
2006	98	91	20
2007	117	114	49
2008	155	140	51
2009	312	203	104
2010	499	211	357
2011	418	148	374
2012	310	92	247
2013	128	34	180
2014	55	20	103
2015	22	4	56
2016	14	2	47
2017	11	2	40
2018	14	5	27
2019	24	2	38
2020	8	N/A	N/A
Totals	**2,445**	**1,139**	**1,788**

Sumber: Statista Research Department (2022)

Selain itu, banyak kebijakan ekonomi AS yang seperti salah langkah dalam mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi konflik mereka dengan Taliban. Contoh terdekat dapat diambil dari AS yang meningkatkan anggaran untuk konflik dengan Taliban pada 2007-2008 (lihat **Gambar 1**). Langkah tersebut terkesan kurang bijaksana mengingat AS sedang mengalami krisis ekonomi yang parah atau biasa disebut *The Great Recession* pada tahun 2006-2008 (Bennet & Kochhar, 2019). Meski AS kemudian memangkas anggarannya pada 2009-2010, AS akhirnya menaikkan anggaran konflik dengan Taliban secara drastis pada 2011. Ini seolah AS tidak mengambil pelajaran penting dari krisis ekonomi sebelumnya dan tetap memprioritaskan konfliknya. dengan Taliban meskipun dianggap tidak ada habisnya dan tidak berdampak positif bagi AS.

Angka 2 triliun USD yang dikeluarkan AS dan jumlah kematian yang diakibatkannya terlalu dibesar-besarkan, mengingat penyaluran anggaran lebih ditujukan untuk keamanan Afghanistan sendiri. Upaya *extra mile* yang dilakukan oleh AS untuk melindungi Afghanistan dari Taliban tampaknya terlalu memaksakan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, keamanan Afghanistan seharusnya menjadi tanggung jawab domestik Afghanistan itu sendiri, bukan AS. Pada akhirnya, hal ini juga melenceng jauh dari tujuan awal ditetapkannya kebijakan *War on Terror* yang seharusnya berakhir dengan tewasnya Osama bin Laden.

Dari perspektif militer, konflik AS-Taliban tidak memberikan manfaat yang baik bagi AS. Saat ini, banyak negara "pesaing" AS aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi baru untuk membuat pasukan konvensional mereka jauh lebih efektif dalam perang. China, Iran, Rusia, dan Korea Utara dapat membuktikan bahwa negara lain telah banyak berinvestasi,

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

memodernisasi kekuatan militernya, dan melengkapi kapasitas militernya dengan teknologi tercanggih.

Pada 2020, misalnya, kapasitas militer Rusia diakui sebagai yang paling modern dalam sejarah sejak runtuhnya Uni Soviet. Angkatan Laut China juga hampir 20% lebih besar dari AS dan diperkirakan 15 tahun lebih maju dari AS dalam modernisasi dan ekspansi (Wood, 2020). Tidak hanya itu, Korea Utara baru-baru ini mendemonstrasikan rudal balistik antarbenua paling canggih dan pernah ada dalam sejarah pengembangan senjata nuklir. Perkembangan signifikan juga dapat dilihat dari negara Iran yang menggandakan upayanya untuk mendukung kelompok teroris, memperluas persediaan rudal yang mengancam negara di kawasan Teluk Persia, dan menggunakan pemerasan nuklir untuk membuat negara-negara Eropa mematuhi aspirasi nuklir Iran.

Tentunya kemampuan militer AS masih sangat mumpuni dan maju dalam tatanan global. Bahkan tidak sedikit pula yang memandang bahwa visi AS untuk menjadi supremasi global dimungkinkan dengan kemampuan teknologinya. Namun, perang yang dilakukan oleh AS dan Taliban tidak mencerminkan kemajuan teknologi AS. Budaya populer perang gerilya dalam konflik ini memberi kesan bahwa AS tidak bergerak maju dari perang konvensional ini. Dengan demikian, konflik dengan Taliban tidak lagi relevan dan dapat menyoroti kemajuan dan stabilitas militer AS dari negara lain.

4.3. Konteks Internasional

Menurut teorinya, Coplin menjelaskan bahwa 3 (tiga) indikator termasuk dalam variabel konteks internasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara: pengaruh geografis, ekonomi, dan politik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa faktor geografis dan ekonomi kurang relevan dengan pembahasan konflik AS-Taliban karena perang antara kedua aktor tersebut tidak didasarkan pada ambisi perebutan wilayah (geografis) atau kepentingan ekonomi. Konflik AS-Taliban lebih cenderung disebabkan oleh ambisi AS yang tidak ingin Taliban menguasai Afghanistan karena dianggap sebagai kelompok teroris dan bertentangan dengan prinsip AS. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa kedua indikator tersebut bukanlah dasar perang antara AS dan Taliban. Sehingga pembahasan dalam konteks internasional bagian ini akan lebih didominasi oleh pembahasan faktor politik dari pihak internasional hingga konflik AS-Taliban.

Beberapa negara, seperti China dan Iran, percaya bahwa AS harus pergi (Sun, 2020) dan berhenti mencampuri urusan Afghanistan (Fathollah-Nejad & Azizi, 2021). Selaras dengan China dan Iran, Rusia juga memiliki pandangan yang sama dan cenderung terlihat berpihak pada Taliban. Tak hanya itu, Rusia dan Taliban bahkan sudah lama menjalin hubungan. Sebelum AS memutuskan untuk mengakhiri konflik dengan Taliban di Afghanistan, beberapa negara telah melakukan hubungan luar negeri dengan Taliban baik dalam bentuk bantuan untuk memfasilitasi penanganan konflik dengan pemerintah Afghanistan atau bentuk hubungan luar negeri lainnya, seperti yang dilakukan oleh China dan Rusia yang sudah mulai memulai interaksi bilateral.

China telah berusaha mempertahankan hubungan pragmatis dengan Taliban baru-baru ini. Pragmatis dalam konteks ini adalah bahwa China mempertahankan hubungannya dengan pemerintah Afghanistan dan Taliban. Sejauh ini, hubungan China dengan Taliban dan Afghanistan terlibat dalam membawa perdamaian ke negara-negara yang berkonflik tersebut. Dari upaya yang dilakukan, China berhasil memberikan kesan sebagai negara yang paling tepat untuk mendorong proses perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan ke arah yang lebih baik (Pandey, 2019). Namun, meskipun China terlihat lebih banyak terlibat dalam

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

proses perdamaian, tidak sedikit juga yang menganggap bahwa China berpihak pada Taliban dengan memberikan beberapa bantuan kepada Taliban dalam konflik tersebut (Kelemen, 2019).

Negara Rusia mengalami hal yang sama. Sejak 2015, Moskow telah menjalin kontak dengan Taliban dan secara aktif menyelesaikan konflik dengan mengadakan beberapa pertemuan intra-Afghanistan pada 2019 (Noorzai *et al.*, 2020). Selain itu, Rusia juga telah "memperkirakan" kemenangan yang akan diraih Taliban, sehingga Rusia berharap negaranya dapat membangun kerja sama yang kooperatif dengan Taliban untuk masa depan Afghanistan yang lebih baik. Selama konflik dengan Taliban, Rusia selalu menunjukkan kesediaannya untuk membantu perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Namun di sisi lain, Rusia juga kerap diduga banyak memberikan bantuan, termasuk memberikan senjata kepada Taliban selama konflik ini (Kurita, 2019).

Tidak seperti kebanyakan negara, Iran memiliki kebijakan yang cukup kontradiktif dan berani terhadap Afghanistan. Iran menjaga hubungan baik dengan pemerintah Afghanistan untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan budayanya. Namun, di sisi lain, Iran juga memberikan dukungan signifikan kepada Taliban, yang pada akhirnya memengaruhi gejolak dan proses politik, sosial, dan ekonomi di Afghanistan (Akbarzadeh & Ibrahimi, 2019).

Kebijakan luar negeri negara lain dalam menjelaskan posisinya atas konflik di Afghanistan masih banyak diperdebatkan. Negara lain umumnya memposisikan negaranya sebagai negara yang anti kekerasan dan menolak penindasan. Namun, di sisi lain, banyak kecurigaan yang menempatkan negara-negara tersebut sebagai aktor yang memfasilitasi dan memihak Taliban dalam konflik di Afghanistan.

Dalam literatur, ketersediaan informasi selain AS, Rusia, China, dan negara besar lainnya, kebijakan luar negeri negara lain tidak terlalu populer mengingat AS. Secara keseluruhan lebih mendominasi konflik ini, negara lain memiliki kebijakan luar negeri yang cukup mirip. kepada pihak China dan Rusia terhadap Taliban di mana mereka umumnya juga memposisikan diri sebagai pihak ketiga yang berusaha membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan, meskipun upaya ini tidak banyak diberitakan oleh media. Seperti upaya hubungan luar negeri Turki yang juga menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi sebagai mediator konflik di Afghanistan dengan menjadi tuan rumah pertemuan pembicaraan damai pada Maret 2019 (Saber, 2019).

Penelitian ini menemukan bahwa tidak cukup informasi mengenai faktor kebijakan negara lain terhadap Taliban yang secara signifikan mendorong ditandatanganinya perjanjian damai oleh AS. dalam memposisikan diri terhadap konflik di Afghanistan.

Namun dari beberapa contoh hubungan bilateral yang dilakukan oleh beberapa negara besar dengan Taliban selama konflik, dapat dilihat bahwa terlepas dari upaya yang dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk membantu mewujudkan perdamaian, masih ada kemungkinan besar bahwa mereka terlibat. memfasilitasi Taliban. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, hal ini tentunya mempengaruhi posisi AS sebagai negara yang terang-terangan terlibat konflik di Afghanistan sebagai pihak yang melawan Taliban.

Dari uraian di atas, terlihat beberapa negara besar menyayangkan konflik antara AS dan Taliban. Bahkan dalam konteks konflik ini, tampaknya ada kecenderungan dari negara-negara tersebut untuk berpihak pada Taliban. Tekanan dari beberapa negara "pesaing" yang kemampuan militer dan ekonominya saat ini dapat membahayakan posisi AS jika mereka mendukung dan memutuskan untuk membantu Taliban dalam konflik ini tentunya harus menjadi pertimbangan yang cukup besar bagi AS dalam menanggapi konflik di Afghanistan. Oleh karena itu, sangat rasional jika AS pada akhirnya mengakhiri konflik dengan Taliban

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

melalui perjanjian damai untuk mengamankan posisi AS dan menghindari potensi konflik yang mungkin timbul jika perang melawan Taliban terus berlanjut.

5. Kesimpulan

Kebijakan luar negeri AS yang memutuskan untuk menandatangani perjanjian damai dengan Taliban dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu kondisi politik dalam negeri AS, kondisi ekonomi dan militer AS, dan konteks internasional.

Dari segi kondisi politik dalam negeri, AS banyak menerima kritik dan penolakan atas ambisinya yang selalu memperpanjang konflik dengan Taliban di Afghanistan. Tanggapan tersebut sebagian besar diperoleh dari tokoh politik AS bahkan warga AS sendiri. Selain itu, alasan mengapa pada akhirnya AS memilih untuk berdamai dalam konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 18 tahun ini adalah karena adanya perubahan strategi geopolitik AS yang mulai fokus ke Asia (Pivot ke Asia). Hal ini kemudian mengakibatkan konflik atau "urusan" lain di kawasan Timur Tengah yang tidak lagi menarik dan populer bagi AS.

Dari segi ekonomi, AS juga mengalami kerugian yang sangat besar dengan menghabiskan anggaran lebih dari 2 triliun USD dan kehilangan ribuan nyawa tentara AS dalam konfliknya dengan Taliban. Kerugian dan pengorbanan tersebut dinilai tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh AS, dimana AS masih belum mampu memenangkan pemerintahan Afghanistan atas Taliban. Tak hanya itu, banyak kebijakan AS yang dinilai kurang tepat dalam memberikan anggaran yang masih mengutamakan pengadaan untuk memerangi Taliban di Afghanistan ketimbang prioritas lain ketika terjadi krisis ekonomi.

Jika dirunut dari segi militer, perang yang dilancarkan AS dan Taliban tidak mencerminkan kemajuan teknologi AS yang diprediksi akan menjadi supremasi global. Budaya populer perang gerilya dalam konflik ini memberi kesan bahwa AS tidak bergerak maju dari perang konvensional. Dengan demikian, konflik dengan Taliban tidak bisa lagi menyoroti kemajuan dan stabilitas militer AS dari negara lain.

Selain itu, konteks internasional juga berperan dalam perjanjian damai AS-Taliban ini. Meski tidak terlalu signifikan, posisi Taliban yang perlahan mulai mendapat dukungan dari beberapa negara besar seperti Rusia dan China juga patut menjadi pertimbangan. Kedua negara yang secara historis memiliki "persaingan" dengan AS telah berkontribusi dalam menekan AS untuk mengakhiri konflik dengan Taliban melalui perjanjian damai.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan kasih kepada Bapak Broto Wardoyo selaku dosen pembimbing tesis dalam studi Ilmu Hubungan Internasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan masukan dalam penulisan ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

Akbarzadeh, S., & Ibrahimi, N. (2019). The Taliban: a new proxy for Iran in Afghanistan? *Third World Quarterly*, *41*(5), 764–782. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1702460

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.

Baczko, A. (2016). Legal Rule and Tribal Politics: The US Army and the Taliban in Afghanistan (2001–13). *Development and Change*, *47*(6), 1412–1433. https://doi.org/10.1111/dech.12276

Behuria, A., Hassan, Y. U., & Saroha, S. (2019). US-Taliban Talks for Afghan Peace: Complexities Galore. *Strategic Analysis*, *43*(2), 126–137. https://doi.org/10.1080/09700161.2019.1595483

Bennett, J., & Kochhar, R. (2022, June 30). *Two Recessions, Two Recoveries*. Pew Research Center's Social & Demographic Trends Project. https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/12/13/two-recessions-two-recoveries-2/

Campbell, K., & Andrews, B. (2013). *Explaining the US 'Pivot' to Asia.* The Asia Group. http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Americas/0813pp_pivottoasia.pdf

Connah, L. (2020). US intervention in Afghanistan: Justifying the Unjustifiable? *South Asia Research*, *41*(1), 70–86. https://doi.org/10.1177/0262728020964609

Council on Foreign Relations. (2019, July 30). *The Presidential Candidates on the War in Afghanistan*. https://www.cfr.org/article/presidential-candidates-war-afghanistan

Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung, Indonesia: Sinar Baru Algesindo.

Duffin, E. (2019). Total U.S. War Spending in Afghanistan by category FY 2001-2019. Statista. https://www.statista.com/statistics/1075910/total-uswar-spending-afghanistan-category

Fathollah-Nejad, A., & Azizi, H. (2021, September 22). *Iran and the Taliban after the US fiasco in Afghanistan*. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/iran-and-taliban-after-us-fiasco-afghanistan

Gollob, S., & O'Hanlon, M. E. (2020). Afghanistan Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-9/11 Afghanistan Washington, DC: Brookings Institution. https://www.brookings.edu/afghanistan-index/

Gross, T. (2021, March 4). *Trump's Deal To End War In Afghanistan Leaves Biden With "A Terrible Situation."* NPR.org. https://www.npr.org/2021/03/04/973604904/trumps-deal-to-end-war-in-afghanistan-leaves-biden-with-a-terrible-situation

Hamid, S. (2022, March 9). *Americans never understood Afghanistan like the Taliban did*. Brookings. https://www.brookings.edu/opinions/americans-never-understood-afghanistan-like-the-taliban-did/

Hubbard, K. (2021, August 19). *Poll: Most Americans Think the War in Afghanistan was 'Not Worth Fighting'*. U.S. News & World Report. . https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2021-08-19/poll-most-americans-think-the-war-in-afghanistan-was-not-worth-fighting

International Crisis Group. (2020, August 11). *Taking Stock of the Taliban's Perspectives on Peace*. https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/311-taking-stock-talibans-perspectives-peace

Kelemen, B. (2019, June 26). *China & the Taliban: Pragmatic Relationship*. CEIAS. https://ceias.eu/china-the-taliban-pragmatic-relationship/

Kim, M. (2013). Empire's Babel: US Military Interrogation Rooms of the Korean War. *History of the Present*, *3*(1), 1–28. https://doi.org/10.5406/historypresent.3.1.0001

Kurita, M. (2019). Pakistan-Russia Relations: Developments and Limitations. In *NIDS Commentary* (No. 85). National Institute for Defense Studies. http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/commentary/pdf/commentary085e.pdf

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

Mitter, R., & Moore, A. W. (2011). China in World War II, 1937–1945: Experience, Memory, and Legacy. *Modern Asian Studies*, *45*(2), 225–240. https://doi.org/10.1017/s0026749x10000387

Neuman, L. W. (2009). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.

Noorzai, R., Sahinkaya, E., & Sarwan, R. G. (2020, July 4). *Afghan Lawmakers: Russian Support to Taliban No Secret*. VOA. https://www.voanews.com/a/extremism-watch_afghan-lawmakers-russian-support-taliban-no-secret/6192205.html

Pandey, S. (2019). Understanding China's Afghanistan Policy: From Calculated Indifference to Strategic Engagement. In ORF Issue Brief (No. 305). Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/understanding-chinas-afghanistan-policy-from-calculated-indifference-strategic-engagement-54126/

Renner, J., & Spencer, A. (2013). De-antagonising the Other: Changing Constructions of the Taliban and the Possibility of Reconciliation. *Global Society*, *27*(4), 475–496. https://doi.org/10.1080/13600826.2013.823915

Roberts, P. M. (2004). The Origins of World War I (review). *The Journal of Military History*, *68*(1), 265–267. https://doi.org/10.1353/jmh.2003.0404

Statista Research Department. (2022, September 30). *Soldiers killed in action in Afghanistan 2001-2021*. https://www.statista.com/statistics/262894/western-coalition-soldiers-killed-in-afghanistan/

Saber, N. (2019, January 7). *Can Turkey broker peace in Afghanistan?* dw.com. https://www.dw.com/en/can-turkey-broker-peace-in-afghanistan/a-46985146

Shahrani, N. M. (2015). The Impact of the 2014 U.S.-NATO Withdrawal on the Internal Politics of Afghanistan. *Asian Survey*, *55*(2), 273–298. https://doi.org/10.1525/as.2015.55.2.273

Stohl, M. (2008). The Global War on Terror and State Terrorism. *Perspectives on Terrorism*, *2*(9), 4–10. http://www.jstor.org/stable/26298369

Sun, Y. (2020, April 8). *China's Strategic Assessment of Afghanistan*. War on the Rocks. https://warontherocks.com/2020/04/chinas-strategic-assessment-of-afghanistan/

Stockholm International Peace Research Institute. (2021, September 22). *20 years of US military aid to Afghanistan | SIPRI*. https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2021/20-years-us-military-aid-afghanistan

Ulfstein, G. (2003). Terrorism and the Use of Force. *Security Dialogue*, *34*(2), 153–167. https://doi.org/10.1177/0967010603034002003

Weisiger, A. (2013). World War II. *Logics of War*, 105–140. https://doi.org/10.7591/cornell/9780801451867.003.0005

Wood, D. (2020, October 15). *The Status of U.S. Military Power in 2020*. The Heritage Foundation. https://www.heritage.org/defense/commentary/the-status-us-military-power-2020

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

Tentang Penulis

Awani Yamora Masta merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan lama studi 3 tahun dua bulan. Saat ini, Yamora sedang melanjutkan studinya sebagai mahasiswa pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, dengan fokus studi keamanan internasional. Yamora tertarik pada studi keamanan internasional, kebijakan luar negeri, kerja sama atau hubungan luar negeri, dan terorisme.
E-Mail: awani.yamora@ui.ac.id

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422